



**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGENDALIAN *INTERN*, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL *MODERATING*
(Studi Kasus OPD Kota Palu)**

Latifa Ismi Setyaningrum, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of information technology utilization, internal control systems, and human resource capacity on the quality of local government financial reports, with organizational commitment as a moderating variable. The study was conducted at the Regional Government Organizations (OPD) of Palu City. Data were obtained from questionnaires filled out by 122 civil servants at the OPD of Palu City and processed using Moderated Regression Analysis (MRA) with IBM SPSS version 23.

The results show that the utilization of information technology, internal control systems, and human resource capacity have a significant influence on the quality of local government financial reports in Palu City. Additionally, organizational commitment was proven to moderate the relationship between these three variables and the quality of local government financial reports.

Keywords: Quality of Local Government Financial Reports, Information Technology Utilization, Internal Control Systems, Human Resource Capacity, Organizational Commitment.

PENDAHULUAN

Dalam proses pengembangan pemerintahan negara, tentu saja memunculkan kewajiban serta hak suatu negara yang bisa dilakukan penilaian dengan nilai ekonomi, dan memerlukan pengaturan maupun penataan pada sebuah sistem pengelolaan negara. Konsep ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 terkait keuangan negara. Selain itu sistem pengelolaan keuangan negara ini perlu disesuaikan dengan suatu peraturan utama atau dasar dalam sebuah UUD. Perubahan yang ada pada perkembangan terbaru dalam sektor publik di Indonesia saat ini menunjukkan adanya peningkatan tuntutan akan akuntabilitas publik oleh instansi-instansi pemerintah, baik dalam tingkat daerah dan pusat. Arti dari terdapatnya tuntutan akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2018) hal tersebut berarti bahwa pemerintah perlu menyampaikan informasi dan mengungkapkan tentang kinerja serta aktivitas keuangan pemda pada beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, membuat adanya keterkaitan yang erat antara hal tersebut dengan aspirasi masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan bersih dari perilaku tidak jujur.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen penting dalam akuntansi pemerintahan yang bertujuan memberikan informasi transparan dan akurat kepada publik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Berlandaskan PP RI No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP, karakteristik kualitatif laporan keuangan merujuk pada norma-norma yang haruslah dipatuhi dalam tiga informasi akuntansi dalam mewujudkan tujuan mereka. Ada empat karakteristik yang haruslah ada supaya sesuai dengan standar mutu yang dikehendaki, yaitu (1) Relevan, Laporan keuangan dipandang sesuai saat data yang terdapat didalamnya bisa memberikan pengaruh pada keputusan penggunaannya secara membantu mereka menilai kejadian yang telah terjadi atau sedang terjadi, serta meramalkan peristiwa yang akan datang, juga mengonfirmasi atau mengoreksi penilaian mereka

¹ Corresponding author



sebelumnya. Akibatnya, informasi yang sesuai di laporan keuangan bisa disesuaikan dengan tujuan pengguna. (2) Andal, Informasi yang ada di laporan keuangan haruslah tidak menyesatkan juga bebas dari kesalahan yang signifikan, menyampaikan setiap detail dengan jujur, dan bisa diverifikasi. Meskipun informasi tersebut mungkin relevan, namun bila esensi ataupun cara penyajian tidak bisa dipercaya, penggunaannya dapat berpotensi menyesatkan. (3) Bisa diperbandingkan, informasi yang ada di laporan keuangan lebih bermanfaat bila bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan dari periode terdahulu. Perbandingan tersebut bisa dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya (4) Bisa diketahui, informasi yang dijelaskan pada laporan keuangan haruslah dimengerti penggunaannya serta disampaikan pada terminologi maupun format yang cocok dengan tingkat pemahaman penggunaannya.

Kualitas LKPD mencerminkan penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah pada periode tertentu. Kualitas LKPD bisa dinilai melalui pendapat BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan juga penilaian terhadap LKPD tersebut. Sebelum diserahkan pada DPRD, LKPD harus melewati proses audit oleh BPK sebagai pihak auditor eksternal. Setiap satu periode, BPK melakukan audit terhadap LKPD untuk menilai kesesuaian informasi yang terdapat di laporan keuangan pemerintah, dengan mempertimbangkan kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan pada standar akuntansi, ketaatan pada peraturan undang-undang, maupun efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil audit akan disampaikan dalam bentuk opini dari BPK, yang dapat berupa WDP, WTP, TMP, atau TW. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 542 LKPD Tahun 2022 telah mengungkap total 7.661 temuan, di mana 12.855 masalah ditemukan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan adanya penemuan tersebut, BPK menemui sejumlah kendala berkaitan dengan keakuratan dalam sistem pengendalian internal maupun penyusunan laporan keuangan, yakni sistem informasi akuntansi (SIA) serta pelaporan tidak memadai, pencatatan belum dijalankan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak senada ketepatan, entitas terlambat melakukan penyampaian laporan dan lainnya. Situasi ini membuktikan kualitas LKPD masih belum maksimal.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih menjadi tantangan bagi banyak daerah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, kualitas LKPD dapat ditingkatkan secara signifikan. Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, sistem pengendalian internal mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan, sedangkan sumber daya manusia yang kompeten mampu menghasilkan laporan yang berkualitas dan relevan. Dengan demikian, investasi dalam ketiga aspek ini bukan hanya merupakan tantangan, tetapi juga merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan LKPD yang lebih baik dan transparan. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Soimah, 2015), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal yang efektif, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam merealisasikan tujuan organisasi, Komitmen organisasi mempunyai peran krusial dalam pencapaian tersebut. Menurut (Robbins & Timothy A. Judge, 2022), komitmen organisasi yakni seberapa jauhkah seseorang pegawai mengenai organisasi, tujuannya, serta harapannya untuk tetap berada sebagai bagian dari organisasi tersebut. Komitmen Organisasi terbentuk berdasarkan kepercayaan pegawai pada nilai organisasi, kemauan mereka untuk aktif berkontribusi dalam memenuhi tujuan organisasi maupun kesetiaan mereka guna terus berada didalam organisasi. Dengan demikian, komitmen organisasi akan memunculkan rasa kepemilikan yang dirasakan oleh karyawan pada organisasi. Bila karyawan merasa terikat pada nilai organisasional, pegawai akan merasa puas dalam pekerjaannya. Pegawai akan mempunyai kesadaran maupun tanggung jawab tinggi ketika menjalankan tugas organisasi. Selain itu, pegawai akan termotivasi dalam menambah pemahamannya terkait pemanfaatan teknologi informasi beserta konsep akuntansi, dan dengan antusias melaporkan setiap aktivitas yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugas mereka. Akhirnya, hal ini akan menghasilkan keterlibatan sukarela dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas pada publik, seperti dalam hal akuntabilitas keuangan lewat laporan keuangan (Lubis et al., 2022). Dalam penelitian Aziyah & Yanto, (2022), Komitmen Organisasi dipakai untuk variabel bebas, kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh (Lubis et al., 2022), Komitmen Organisasi dipergunakan untuk variabel dependen, sementara pada penelitian Mulyadita et al., (2019), Komitmen Organisasi dipergunakan menjadi

variabel moderasi. Dengan adanya penelitian tersebut, menunjukkan adanya variasi dalam perlakuan terhadap variabel Komitmen Organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka di studi ini komitmen organisasi dipakai menjadi variabel moderasi sebab mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaruh pada keterkaitan antara “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian *Intern*, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Peneliti meyakini bahwasanya komite organisasi yang kuat akan menggerakkan anggota guna berupaya keras dalam mewujudkan sasaran organisasi. Tujuan utama pemerintah daerah salah satunya yakni memastikan kualitas LKPD yang berkualitas atau baik, oleh karenanya pemerintah daerah akan mengupayakan peningkatan sistem pengendalian *intern*, pemanfaatan teknologi informasi, maupun kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas LKPD.

Dari uraian sebelumnya, menjadi menarik guna mendalami lebih lanjut tentang kualitas laporan keuangan OPD Kota Palu beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Alasan peneliti melakukan pemilihan Kota Palu sebagai tempat penelitian didasarkan pada minimnya penelitian yang membahas akan kualitas laporan keuangan OPD di daerah tersebut, terutama akan penggunaan variabel-variabel tersebut terhadap kualitas LKPD. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan mereka sehingga mencapai opini WTP tanpa mendapatkan catatan perbaikan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal (Masyarakat atau legislatif) dan agen (Pemerintah) dalam konteks kontraktual. Agen memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan prinsipal, termasuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal yang kuat, dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai menjadi kunci dalam mewujudkan prinsip-prinsip keagenan. Asimetri informasi yang kerap terjadi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem akuntansi terintegrasi, misalnya, memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi peluang manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan relevan untuk menilai kinerja pemerintah. Selain itu, sistem pengendalian internal yang memadai dan dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran pemerintah.

Menurut Jensen & William H. Meckling (1976), hubungan prinsipal-agen ini dapat dipandang sebagai "nexus of contracts". Penelitian Yusrawati & Cahyanti (2016) juga mendukung pandangan ini, dengan menyoroti pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Teori Kegunaan Keputusan Informasi

Teori ini menyangkut terkait persyaratan dari mutu informasi akuntansi yang bermanfaat terhadap penentuan keputusan oleh penggunanya. Dalam artikel Octavia (2017), Teori yang menekankan kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan (Decision-Usefulness) mewajibkan komponen-komponen laporan keuangan memenuhi kaidah-kaidah tertentu agar bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Kaidah-kaidah ini didasarkan pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum didalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini menyoroti bahwa sistem informasi akuntansi yang efektif harus dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjabaran teori diatas, terdapat hubungan yang relevan antara teori Kebergunaan Keputusan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian *Intern*, maupun Kapasitas Sumber Daya Manusia terletak pada performa informasi yang dihasilkan oleh pemda baik sebelum dan setelah penggunaan sistem komputerisasi. Selanjutnya, peran penting

dalam kerangka teori keagenan di pemerintahan daerah. Dengan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap pemerintah daerah, pengendalian internal berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang positif, transparan, akuntabel. Di sisi lain, teori kegunaan-keputusan memandang pengendalian *intern* sebagai motivator bagi pengguna karena potensinya dalam menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan pengendalian *intern* yang efektif menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas, selaras dengan tujuan kedua teori, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Dari pembahasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan Rahmawati & Trisnawati (2021), yang mana sistem pengendalian *intern* mempengaruhi kualitas laporan keuangan berarti bertambah baiknya sistem pengendalian *intern*, kualitas laporan keuangan pemda akan bertambah baik juga. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, hipotesis berikut dapat diajukan:

H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas *LKPD* merupakan poin yang tidak dapat dilewatkan dalam akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemda yang mempunyai kualitas baik mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan transparan. Kapasitas sumber daya manusia memegang peran krusial dalam menghasilkan laporan keuangan pemda yang memiliki kualitas. Pembahasan di atas selaras dengan prinsip-prinsip dalam teori keagenan dan teori kegunaan-keputusan. laporan keuangan pemda yang memiliki kualitas menambah kepercayaan prinsipal pada agen dengan informasi akurat dan transparan, meminimalkan penyalahgunaan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas. Di sisi lain, teori kegunaan-keputusan menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas memudahkan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sinergi kedua teori ini menegaskan bahwa laporan keuangan pemda yang memiliki kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang tinggi adalah pilar krusial untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang positif menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi, maupun pengambilan keputusan yang efektif.

Pendapat tersebut sesuai hasil penelitian yang dilaksanakan Mulyadita et al. (2019), bahwasanya kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda di Kab. Rokan Hilir. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilaksanakan Andrianto & Rahmawati (2017), menunjukkan kapasitas sumber daya manusia memberi pengaruh positif ke kualitas laporan keuangan pemda. Mengacu pada uraian yang telah disampaikan, hipotesis berikut dapat diajukan:

H3 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas *LKPD*. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dipercaya dapat membantu meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keandalan informasi maupun data yang mendasari *LKPD*. Namun, pengaruh teknologi informasi pada kualitas *LKPD* dapat dimoderasi oleh komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal guna mendapat *LKPD* yang berkualitas. Sebaliknya, komitmen organisasi yang lemah dapat menghambat efektivitas teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas *LKPD*. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam penyusunan *LKPD* perlu diiringi dengan komitmen organisasi yang kuat untuk memaksimalkan manfaat teknologi informasi dan menghasilkan *LKPD* yang berkualitas tinggi. Berdasarkan prinsip teori keagenan, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif maupun komitmen organisasi yang kuat pada akuntabilitas maupun transparansi saling memperkuat dalam menghasilkan *LKPD* berkualitas tinggi. *LKPD* berkualitas ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, meminimalkan penyalahgunaan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas. Penerapan teknologi

informasi yang efektif dengan komitmen organisasi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan LKPD berkualitas tinggi dan akuntabilitas transparan dalam pemerintahan daerah.

Penjelasan diatas sangat sesuai hasil penelitian yang dilaksanakan Mulyadita et al. (2019), temuan penelitian memperlihatkan ada hubungan diantara komitmen organisasi serta pemanfaatan teknologi informasi selaku variabel pemoderasi dalam memengaruhi kualitas LKPD. Berlandaskan pemaparan yang telah disampaikan, hipotesisnya yakni:

H4: Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas LKPD.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen organisasi, yang diwujudkan melalui kepemimpinan yang kuat dan budaya pengendalian internal yang positif, menguatkan interaksi diantara sistem pengendalian *intern* dengan kualitas LKPD. Organisasi dengan komitmen tinggi akan lebih konsisten dalam menerapkan sistem pengendalian *intern* dan menindaklanjuti kelemahan yang ditemukan, sehingga menambah kualitas laporan keuangan pemda secara keseluruhan dengan informasi keuangan yang lebih andal dan terpercaya. Dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa organisasi dengan komitmen tinggi akan lebih konsisten dalam menerapkan sistem pengendalian *intern* dan menindaklanjuti kelemahan yang ditemukan. Sedangkan dalam teori kegunaan-keputusan, laporan keuangan pemda yang berkualitas bisa menjadi informasi yang andal dan terpercaya bagi pengambilan keputusan oleh beragam pihak. Komitmen organisasi yang kuat memastikan sistem pengendalian *intern* diterapkan dengan efektif, menciptakan LKPD yang lebih bermanfaat dan mengurangi risiko bagi berbagai pihak.

Penelitian yang dilaksanakan Fathia et al. (2020) mendukung argumen di atas, dengan menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* serta komitmen organisasi mempengaruhi positif signifikan kepada kualitas LKPD, dengan komitmen organisasi memoderasi hubungan tersebut.

H5: Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas LKPD.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kapasitas sumber daya manusia yang memadai mempengaruhi positif ke kualitas laporan keuangan pemda. Sumber daya manusia yang kompeten serta berpengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan publik bisa mendatangkan laporan keuangan pemda yang akurat, lengkap, serta terpercaya. Komitmen organisasi, yang diwujudkan melalui kepemimpinan yang kuat dan budaya kerja yang positif, menguatkan interaksi diantara kapasitas sumber daya manusia dan kualitas LKPD. Organisasi dengan komitmen tinggi akan lebih konsisten dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, menyediakan pelatihan yang memadai, maupun menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja sumber daya manusia. Hal ini bisa menambah kinerja dan motivasi sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan pemda yang memiliki kualitas, serta menambah kepercayaan publik pada kinerja pemda. Teori Keagenan memandang hubungan antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Kapasitas sumber daya manusia yang memadai maupun komitmen organisasi yang kuat membantu meminimalkan asimetri informasi serta konflik keagenan diantara prinsipal dengan agen, laporan keuangan pemda yang memiliki kualitas tinggi menjadi alat akuntabilitas utama bagi agen untuk menunjukkan kinerja dan pertanggungjawaban kepada prinsipal. Kemudian dalam teori Kegunaan-Keputusan berfokus pada manfaat informasi laporan keuangan pemda bagi penggunaannya, yakni masyarakat. laporan keuangan pemda yang memiliki kualitas, dihasilkan oleh sumber daya manusia yang kompeten maupun organisasi yang berkomitmen, menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan terpercaya bagi masyarakat. Informasi ini membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kinerja pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong akuntabilitas sosial.

Berdasarkan pendapat yang telah diurai diatas diperkuat juga oleh hasil penelitian yang dilaksanakan Mulyadita et al. (2019), bahwasanya interaksi kapasitas sumber daya manusia maupun komitmen organisasi mempengaruhi positif signifikan pada kualitas LKPD, dengan komitmen organisasi memoderasi hubungan tersebut.

H6: Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Sumber Daya Manusia pada Kualitas LKPD.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di 30 OPD Kota Palu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan berkontribusi langsung pada laporan keuangan. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria responden yaitu pegawai yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan, seperti Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara, dan Staf Keuangan. Sebanyak 122 responden terlibat dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian *intern*, kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Selanjutnya, komitmen organisasi dimasukkan ke dalam variabel moderasi untuk melihat pengaruhnya pada hubungan antar variabel.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam pengelolaan informasi. Adapun mencakup serangkaian proses mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, hingga penyebaran informasi. Dalam proses ini dilakukan dengan bantuan perangkat dan sistem yang terintegrasi. (Wilkinson et al., 2000)	1. Pemanfaatan Perangkat Lunak dan Keras Komputer 2. Pemanfaatan Jaringan Suyanto. M. (2005) & Sukirman et al. (2012)	Skala Ordinal 1 – 5
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	Sistem Pengendalian <i>Intern</i> dapat didefinisikan sebagai suatu proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh pihak dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi. (PP No. 60 Tahun 2008 & PP No. 8 Tahun 2006)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan PP No. 60 Tahun 2008	Skala Ordinal 1 – 5
Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kapasitas sumber daya manusia merupakan potensi organisasi ataupun individu untuk menjalankan tanggung jawab beserta tugas dengan memadai melalui pelatihan,	1. Pelatihan 2. Pengalaman 3. Tanggung Jawab 4. Latar Belakang	Skala Ordinal 1 – 5

	pengalaman, pendidikan, memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan serta kualitas laporan keuangan. (Kutu Goo & Lamawitak, 2021)	Assari & Binawati (2022) dan Antika & Putri (2018)	
Komitmen Organisasi	Komitmen organisasi yakni ukuran dari seberapa kuat anggota organisasi berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi. (Robbins & Judge, 2016)	1. Komitmen Normatif 2. Komitmen Afektif 3. Komitmen Berkelanjutan (Robbins & Judge, 2016)	Skala Ordinal 1 – 5
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan cerminan dari keandalan dan relevansi informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas tidak hanya memenuhi standar akuntansi pemerintah, tetapi juga mampu memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam mengambil keputusan. (Assari & Binawati, 2022)	1. Andal 2. Relevan 3. Bisa diperbandingkan 4. Bisa dipahami PP Nomor 71 Tahun 2010	Skala Ordinal 1 – 5

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain causal comparative untuk menguji hubungan antar variabel. Sumber data penelitian berupa data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1-5 yang disebar kepada responden. Dalam pengujian analisis statistik pada penelitian ini menggunakan software yaitu SPSS (Statistical Product and Service Solution) 23. Analisis yang digunakan yaitu moderated regression analysis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 129 kuesioner didistribusikan kepada para responden oleh peneliti. Terdapat 126 kuesioner yang dikembalikan, di mana 122 di antaranya diproses untuk analisis data. Tiga kuesioner lainnya adalah outlier yang tidak digunakan oleh peneliti. Berdasarkan pengisian kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas partisipan dalam penelitian ini adalah laki-laki, yakni 41 orang (34%), sementara 81 orang (66%) adalah perempuan. Kemudian berdasarkan usia, mayoritas partisipan di penelitian ini berusia 41 - 50 tahun, mewakili 44%, dilanjut dengan usia 31 - 40 tahun sebanyak 40%, usia 20 - 30 tahun sebanyak 9%, dan usia > 50 tahun sebanyak 7%. Selanjutnya berdasarkan jabatan, penelitian ini melibatkan Kepala subbagian keuangan sebesar 9%, Staf Keuangan sebesar 40%, Bendahara Pengeluaran sebesar 44%, dan Bendahara Penerimaan sebesar 7%. Berlandaskan tingkat pendidikan responden yang mengisi kuesioner, sebagian besar adalah lulusan S1 yaitu 41%, diikuti dengan lulusan S2 sebesar 20%, lulusan SMA/SMK sebesar 12% dan sisanya sebesar 4% merupakan lulusan pendidikan terakhir. Kemudian jika dilihat dari masa kerja di OPD, mayoritas responden yang berpartisipasi di studi ini adalah responden yang telah bekerja 1- 5 tahun yakni 89%, sementara responden yang bekerja selama > 5 tahun sebesar 11%.

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Berlandaskan uji validitas, ada 44 elemen yang valid untuk semua variabel, dimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 11 item pertanyaan, pemanfaatan teknologi informasi 6 item pertanyaan, sistem pengendalian *intern* 10 item pertanyaan, kapasitas sumber daya manusia 9 item pertanyaan, dan komitmen organisasi 8 item pertanyaan yang berarti semua variabel dapat digunakan. Hal ini dibuktikan dengan nilai nilai r -hitung pada tiap item pertanyaan berada diatas r -tabel yang sebesar 0.1779 ($df = 122 - 2 = 120$; $\alpha = 0,05$).

Uji Reliabilitas

Temuan perhitungan dari uji reliabilitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian *intern*, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi memperlihatkan bahwasanya nilai Cronbach's Alpha (α) atas tiap variabel melebihi 0,60. Berlandaskan temuan uji reliabilitas tersebut, disimpulkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan untuk setiap variabel memenuhi syarat.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Distribusi data dianggap normal bila koefisien *asympt sign* (two-tailed) melebihi $\alpha = 0,05$. Tabel ini menampilkan temuan uji ini:

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Asymp. Sig.</i>	Keterangan
0,080	0,054	Normal

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berlandaskan tabel uji ini yang disebutkan sebelumnya, nilai *Asymp. Sig.* ialah 0,054. Nilai ini lebih besar dari nilai α yang ditetapkan sebesar 0,05. Distribusi data di penelitian ini tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Ketika nilai determinasi melebihi ($VIF > 10$) serta angka tolerance kurang dari 0.10, maka hal ini mengindikasikan adanya masalah multikolinieritas. Sebaliknya, ketika nilai $VIF < 10$ serta tolerance > 0.1 , maka model regresi di studi ini tidak ada masalah multikolinieritas. Tabel di bawah ini menunjukkan temuan uji ini:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1)	0,850	1,177	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sistem Pengendalian <i>Intern</i> (X_2)	0,861	1,161	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_3)	0,884	1,131	Tidak terjadi Multikolinearitas
Komitmen Organisasi (Z)	0,883	1,133	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berlandaskan tabel tersebut, disimpulkan bahwasanya keseluruhan variabel tidak ada multikolinearitas sebab nilai $VIF < 10$ serta *tolerance* $> 0,1$.

Uji Heterokedastisitas

Metode Glejser dipergunakan untuk uji ini. Model regresi dianggap bebas dari heteroskedastisitas ketika probabilitas signifikansi variabel melebihi 0,05. Tabel ini menunjukkan temuan uji heteroskedastisitas :

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Independen	Nilai Signifikan	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1)	0,913	Bebas dari Heterokedastisitas
Sistem Pengendalian Intern (X_2)	0,082	Bebas dari Heterokedastisitas
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_3)	0,189	Bebas dari Heterokedastisitas
Komitmen Organisasi (Z)	0,077	Bebas dari Heterokedastisitas

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berlandaskan tabel tersebut, disimpulkan bahwasanya keseluruhan variabel tidak ada heteroskedastis sebab nilai sig. $>0,05$.

Uji Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Tabel 5 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	216,539	14,635		14,796	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	3,553	0,665	1,873	5,341	0,000
Sistem Pengendalian Intern	0,996	0,388	1,059	2,569	0,011
Kapasitas Sumber Daya Manusia	1,020	0,477	0,910	2,137	0,035
Komitmen Organisasi	6,105	0,470	5,316	12,993	0,000
Komitmen Organisasi*Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,121	0,022	3,948	5,539	0,000
Komitmen Organisasi*Sistem Pengendalian Intern	0,039	0,013	2,155	2,986	0,003
Komitmen Organisasi*Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,037	0,015	1,686	2,456	0,016
Adjusted R Square	0,689				
F Hitung	39,234				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian H1 memperlihatkan bahwasanya, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.13, dari hasil uji hipotesis tersebut memperlihatkan bahwa $t_{hitung} 5,341 > nilai t_{tabel} 1,979$ dan nilai tingkat signifikansi sebanyak $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian ini juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu

organisasi di pemerintahan daerah telah dilakukan dengan baik, sehingga penyajian laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kualitas yang bermutu. Temuan studi ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara masyarakat dan DPRD (prinsipal) dan Pemda (agen) dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana pemanfaatan teknologi informasi membantu mengurangi asimetri informasi dengan meningkatkan transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu penyajian data keuangan. Kemudian hasil penelitian ini juga mendukung teori kegunaan keputusan informasi dengan meningkatkan kegunaan LKPD bagi para penggunanya. Kecepatan penyajian, keandalan data, dan relevansi informasi dalam LKPD yang dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dapat membuat pengguna mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Hal tersebut sejalan dengan studi sebelumnya oleh Mulyadita et al. (2019), yang memperlihatkan bahwasanya penggunaan TI berdampak positif pada kualitas LKPD.

Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji H2, sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Hal ini dibuktikan pada tabel 4.13, dari hasil uji hipotesis tersebut memperlihatkan bahwa $t_{hitung} 2,569 > \text{nilai } t_{tabel} 1,979$ dan nilai tingkat signifikansi sebanyak $0,011 < 0,05$. Hasil pengujian ini juga membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian *intern* dalam suatu organisasi di pemerintahan daerah telah dilakukan dengan baik, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Hal ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan, kecurangan, atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan, bahwa sistem pengendalian *intern* yang efektif membantu mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan oleh agen, sehingga meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap agen. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan teori kegunaan keputusan informasi, dimana sistem pengendalian *intern* yang efektif memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD akurat, terjamin kebenarannya, dan mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sesungguhnya. Hal tersebut selaras dengan temuan studi sebelumnya oleh Andrianto & Rahmawati (2017), hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwasanya SPI berdampak positif pada kualitas LKPD.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian H3 memperlihatkan bahwasanya, kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Ini bisa ditunjukkan dengan melihat nilai $t_{hitung} 2,137 > \text{nilai } t_{tabel} 1,979$ dan nilai tingkat signifikansi sebanyak $0,035 < 0,05$. Koefisien regresi yang bernilai positif senilai 1,020 memperlihatkan bahwasanya semakin besar kapasitas SDM, maka begitu pula kualitas LKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan daerah telah mempunyai keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas organisasi. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dimana, dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dapat membantu meningkatkan efektivitas agen dalam menjalankan tugasnya, sehingga meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap agen. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam akuntansi dan keuangan mampu menghasilkan LKPD yang akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan teori kegunaan keputusan informasi dimana dengan adanya kapasitas sumber daya manusia kompeten dapat meningkatkan kegunaan LKPD bagi para penggunanya. Hal tersebut selaras dengan penelitian Mulyadita dkk. (2019), temuan studi ini sama dengan studi sebelumnya yang memperlihatkan bahwasanya kualitas LKPD dipengaruhi positif oleh kapasitas SDM.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berlandaskan uji hipotesis 4, dapat diperlihatkan bahwasanya nilai $t_{hitung} 5,539 > \text{nilai } t_{tabel} 1,979$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal tersebut membuktikan bahwa interaksi komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas LKPD. Sehingga bisa diketahui bahwa H4 dapat diterima, yang dapat diartikan bahwasanya, Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas

LKPD. Ini tidak sama dengan studi yang dijalankan Fathia et al. (2020), dimana komitmen organisasi tidak bisa memperkuat pengaruh pendayagunaan teknologi informasi pada kualitas LKPD. Tetapi sama dengan hasil temuan penelitian Mulyadita et al. (2019) di OPD Kab. Rokan Hilir, yang mengamati bahwa pendayagunaan TI, dengan keterlibatan organisasi yang moderat, memberi dampak pada kualitas LKPD. Individu yang berkomitmen tinggi terhadap tujuan organisasi cenderung lebih termotivasi untuk menggunakan teknologi informasi dengan tepat dan efektif atas menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Penjelasan tersebut sesuai dengan pandangan Mulyadita et al. (2019) yang menyatakan, Komitmen organisasi yang kuat dapat menjadi pendorong bagi pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi teknis para pegawai, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kompetensi ini memungkinkan pegawai untuk mengolah data transaksi keuangan secara lebih akurat dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis 5, dapat diperlihatkan bahwa nilai $t_{hitung} 2,986 >$ nilai $t_{tabel} 1,979$ dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Hal tersebut membuktikan bahwa interaksi komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian *intern* pada kualitas LKPD. Sehingga bisa diketahui bahwa H_5 dapat diterima, yang dapat diartikan bahwasanya, Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Kualitas LKPD. Temuan analisis ini tidak sejalan dengan temuan penelitian Andrianto & Rahmawati (2017), dimana komitmen organisasi tidak bisa memperkuat pengaruh sistem pengendalian *intern* pada kualitas LKPD yang ada pada SKPD di Kabupaten Sleman. Tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia et al. (2020), dimana komitmen organisasi dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian *intern* pada kualitas LKPD. Komitmen organisasi, yang diukur dari kekuatan dedikasi dan perhatian pegawai terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta nilai-nilai dan orientasi mereka terhadap organisasi, merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem pengendalian *intern* memadai. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, dimana komitmen organisasi yang tinggi pada manajemen akan mendorong pegawai untuk bertindak sebagai agen yang baik, yaitu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, termasuk dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan demikian, kepentingan prinsipal (dalam hal ini, pemerintah daerah atau masyarakat) dapat terlindungi.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis 6, ditunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} 2,456 >$ nilai $t_{tabel} 1,979$ dan nilai signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$. Hal tersebut membuktikan bahwa interaksi komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia pada kualitas LKPD. Sehingga bisa diketahui bahwa H_6 dapat diterima, yang dapat diartikan bahwasanya, Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas LKPD. Menurut Mulyadita et al. (2019), yang melakukan penelitian di OPD Kabupaten Rokan Hilir, menunjukkan bahwasanya komitmen organisasi meningkatkan dampak kapasitas SDM pada kualitas LKPD, temuan penelitian tersebut sejalan dengan temuan penelitian ini. Individu yang memiliki komitmen tinggi tidak hanya termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga aktif dalam mengembangkan kompetensi pegawai. Sinergi antara komitmen dan kapasitas ini memungkinkan individu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan dengan teori keagenan, dimana individu dengan komitmen tinggi akan bertindak sebagai agen yang baik, memaksimalkan upaya untuk mencapai tujuan principal, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Dengan komitmen organisasi yang tinggi dapat membantu menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan organisasi. Sehingga, individu akan lebih termotivasi untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas yang mencerminkan kinerja sebenarnya dari organisasi.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian *intern*, kapasitas sumber daya manusia pada kualitas LKPD serta untuk mengetahui pengaruh interaksi komitmen organisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia pada kualitas LKPD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu penyajian data keuangan. Sistem pengendalian internal yang efektif, terutama dalam hal penilaian risiko dan kegiatan pengendalian, juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas LKPD. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, baik dalam hal keterampilan maupun pengetahuan, menjadi kunci dalam menghasilkan LKPD yang berkualitas. Selain itu, komitmen organisasi berperan sebagai penguat terhadap faktor-faktor tersebut. Komitmen organisasi yang tinggi dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi, mematuhi sistem pengendalian internal, dan memaksimalkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga menghasilkan LKPD yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menekankan pentingnya peran komitmen dalam mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas LKPD memerlukan sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan komitmen organisasi.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa keterbatasan yang didapatkan, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada dampak dari variabel bebas terhadap kualitas LKPD, seperti penggunaan teknologi informasi, sistem pengendalian *intern* dan kapasitas sumber daya manusia. Menurut hasil penelitian ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi faktor selain ketiga variabel independen tersebut. Variabel independen lain berperan terhadap kualitas LKPD, yang ditunjukkan dengan sumbangan efektif dari ketiga variabel independen tersebut (24,7%).
2. Penelitian ini hanya menggunakan data cross-sectional, sehingga sulit untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke dalam konteks yang berbeda atau untuk menganalisis perubahan kualitas LKPD dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini mempergunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, yang berarti bahwa data yang diperoleh hanya didasarkan pada deskripsi pendapat staf keuangan OPD Kota Palu, yang berarti bahwa peneliti tidak dapat menjamin bahwa jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat digeneralisasi ke semua pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Perlu dilakukan pengukuran kualitas LKPD yang lebih menyeluruh dengan melibatkan berbagai aspek, baik kuantitatif maupun kualitatif. Selain mengukur akurasi dan ketepatan waktu, penelitian dapat juga menggali aspek-aspek seperti relevansi, kepastian, keterbandingan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD, seperti perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, dan tekanan dari kelompok kepentingan.
2. Disarankan untuk menggunakan desain penelitian longitudinal atau panel data untuk dapat menganalisis perubahan kualitas LKPD dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang lebih kuat antara variabel-variabel penelitian. Serta, perlunya dilakukan perluasan sampel penelitian dengan melibatkan lebih banyak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

REFERENSI

- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2017). PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman). *Jurnal Profita*, 6.
- ANTIKA, R. J., & PUTRI, Z. E. (2018). *PENGARUH KEAHLIAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEUANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA BAGIAN KEUANGAN KEPOLISIAN RESOR DI WILAYAH POLDA BENGKULU*.
- Asiah, A. N., Amril, & Ramly. (2019). *PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP NILAI PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Kantor SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Gowa)*.
- Assari, I. D., & Binawati, E. (2022). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN). *ALBAMA: Jurnal Bisnis Administrasi Dan Manajemen*, 15.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 6(1), 977–989. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686>
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). In *Pekbis Jurnal* (Vol. 12, Issue 1).
- Jensen, M. C., & William H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.
- Kutu Goo, E. E., & Lamawitak, P. L. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*.
- Lubis, N., Harahap, A. Y., & Syardiansah, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi dan Akuntansi Terhadap Komitmen Organisasi Dimoderasi Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 18(1), 23. <https://doi.org/10.29406/jmm.v18i1.3770>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Penerbit ANDI.
- Mulyadita, R., Ratnawati, V., Silfi, A., Kuantan Singingi, I., Kuantan, T., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2019). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Pengelolaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Studi pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)*. <http://je.ejournal.unri.ac.id/>
- Octavia, M. (2017). DECISION USEFULNESS THEORY. *Articles / Entrepreneurship-Business Creation*. <https://binus.ac.id/malang/2017/10/decision-usefulness-theory/>
- Rahmawati, M., & Trisnawati, R. (2021). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *REVIEW OF APPLIED ACCOUNTING RESEARCH (RAAR)*, 1.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Perilaku organisasi* (16 Edition). Jakarta, Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Timothy A. Judge. (2022). *Organizational Behavior* (Eighteenth Edition). Pearson Education Limited.



- Soimah. (2015). *Pengaruh Kapasitas sumber daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu*.
- Sukirman, Sularso, H., & Nugraheni, E. S. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*.
- Suyanto. M. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Andi.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., & Raval, V. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications* (Fourth Edition). John Wiley & Sons.
- Yusrawati, & Cahyanti, N. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi, Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Ekonomi KIAT*, 21(1).